

# Pendampingan

Implementasi Pola Pengelolaan  
Keuangan Badan Layanan Umum  
Daerah (BLUD)

Pusat Kesehatan Masyarakat  
(Puskesmas)





## Latar Belakang

Saat ini, berbagai permasalahan masih menyelimuti pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut diantaranya anggaran yang terbatas untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, aturan keuangan daerah yang menghambat kelancaran kegiatan pelayanan publik, sulitnya mengukur kinerja pelayanan publik sebagai bentuk akuntabilitas instansi, dan alur birokrasi yang terlalu panjang yang menghambat pelayanan publik.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini sangat diperlukan bagi UPT/D yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pada pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut,

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

UPT/D di dinas kesehatan sangat memungkinkan untuk menerapkan PPK-BLUD. Akan tetapi dengan catatan bahwa unit tersebut mampu menciptakan pendapatan sendiri di luar APBD. Salah satu perwujudan pelayanan di bidang kesehatan adalah dibentuknya puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar di suatu daerah. Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat penerima layanan, sehingga prinsip akuntabilitas sangat penting untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Puskesmas dapat melakukan Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk mencapai prinsip akuntabilitas. PPK-BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan beberapa pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

**Dalam melaksanakan penerapan PPK BLUD di UPT/D banyak mengalami hambatan dalam akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban setelah menerapkan BLUD, antara lain sebagai berikut:**

- 1.** Penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
- 2.** Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan untuk penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan BLUD
- 3.** Penyusunan laporan keuangan BLUD

# **Solusi Permasalahan BLUD kami memiliki layanan berupa:**



**Dari permasalahan yang ada  
perlu adanya peningkatan  
kapasitas SDM agar Pola  
Pengelolaan Keuangan BLUD  
berjalan dengan baik.**

## **Pendampingan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD**

Puskesmas yang telah menerapkan BLUD memerlukan pendampingan secara intensif untuk melaksanakan PPK BLUD. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan memahami implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam persiapan dan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Pendampingan ini bertujuan agar instansi Puskesmas mampu menyajikan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat diterima oleh BPK.



# Rincian Output Pendampingan

Pendampingan

Output

**Pendampingan penyusunan  
rencana bisnis & anggaran**

**Dokumen RBA**

**Pendampingan Penerimaan,  
Pengeluaran, dan Pembiayaan  
BLUD**

**Laporan Pertanggung  
jawaban Penerimaan,  
Pengeluaran dan  
Pembiayaan BLUD**

**Pendampingan penyusunan  
laporan keuangan BLUD**

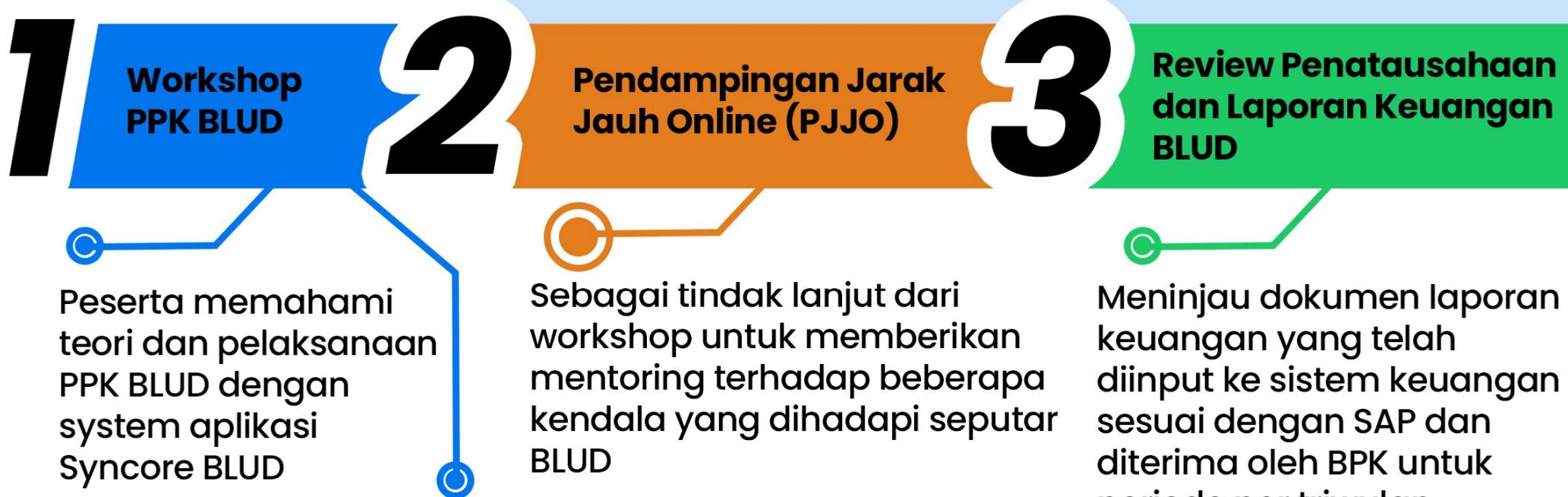
**Laporan keuangan sesuai  
PSAP13**



# Metode Layanan

## Metode pendampingan Periode 1 tahun

### **Financial Services Consultant**



Modul	Hari	PIC/Mentor
Pengantar BLUD & Tata kelola BLUD	Hari ke-1	
Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA)	Hari ke-2	Tenaga Ahli dan Konsultan BLUD
Alur Penerimaan & Pengeluaran		
Penatausahaan Pejabat Keuangan	Hari ke-3	
Penyusunan Laporan Keuangan		

#### Fasilitas Pendampingan

1. Materi PPK BLUD
2. Trial dan praktik sistem Syncore BLUD
3. Free sistem Syncore BLUD dan konsultasi dengan Financial Services Consultant (FSC)
4. Review penatausahaan per triwulan dan laporan keuangan semesteran maupun tahunan

# Pendampingan PPK BLUD dengan Financial Services Consultant (FSC)



o Syncore BLUD hadir dalam memberikan layanan unggulan yang lebih intensif dengan menyediakan tim khusus dalam pendampingan PPK BLUD melalui Financial Services Consultant (FSC).

o Financial Services Consultant (FSC) berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan seperti pada pemahaman BLUD, kendala sistem aplikasi serta review laporan BLUD secara efektif dan akuntabel. FSC memberikan layanan berupa:

## Layanan Financial Services Consultant (FSC)

1

**Inbond:** tanya jawab seputar permasalahan blud

2

**Outbond:** review inputan system

3

**Review** penatausahaan keuangan (triwulan), laporan keuangan (semesteran dan tahunan)

Untuk memberikan layanan prima, FSC memfasilitasi melalui:

1. Voice: telepon

2. Typing: whatsapp dan email

3. Meeting: zoom meeting

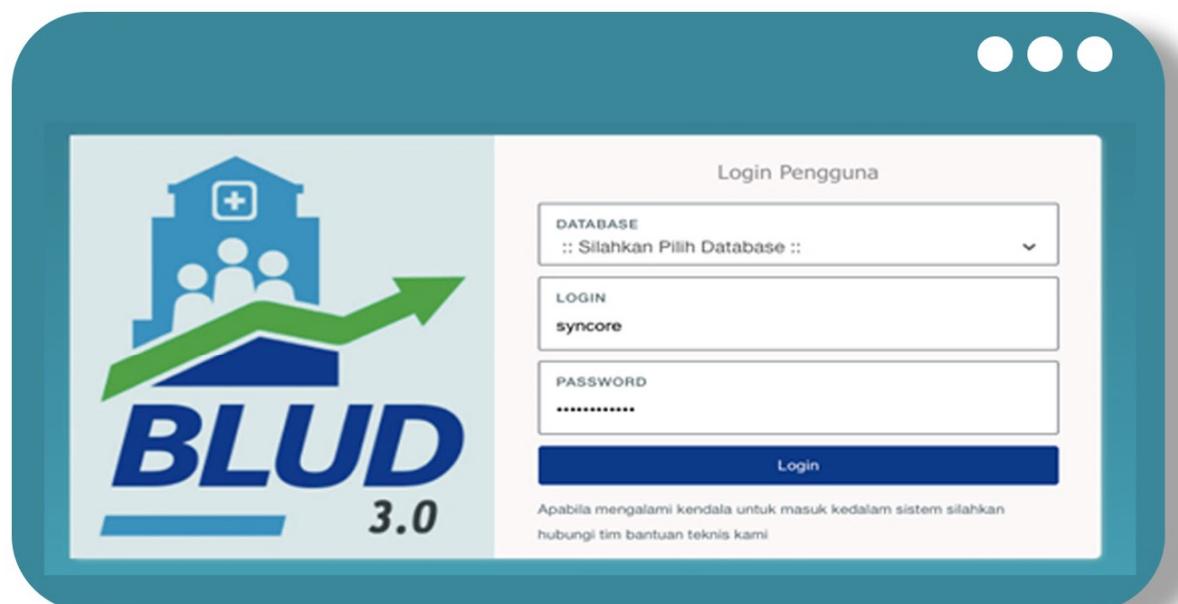
# Digitalisasi Pengelolaan Keuangan



## Menggunakan Software BLUD Syncore Sistem (Alur Sistem)

Syncore hadir dengan software Laporan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berbasis web (software) online untuk menunjang kinerja Puskesmas agar efisien dan efektif dalam membuat laporan keuangan. Berikut ini adalah tampilan dari sistem Syncore BLUD:

Gambar 1  
Tampilan User Login Sistem Syncore BLUD



Gambar 2  
Tampilan dashboard user Pejabat Keuangan



Gambar 3  
Tampilan Laporan Penyajian Penatausahaan Keuangan

# Indikator Kesuksesan Pendampingan PPK BLUD

Workshop Pola Pengelolaan Keuangan BLUD		
INDIKATOR	TARGET	METODE POTENSIAL
Partisipasi Peserta Workshop PPK BLUD	Peserta workshop memiliki komitmen untuk mengikuti workshop dari awal sampai akhir sesuai dengan program dan jadwal yang telah direncanakan dan memiliki komitmen meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban BLUD di instansi bekerja.	Kuesioner, Absensi, dan Pengamatan
Jadwal Pelaksanaan Workshop	Workshop PPK BLUD dilaksanakan selama 3 hari sesuai jadwal	Pelaksanaan workshop sesuai jadwal
Anggaran Workshop PPK BLUD	Anggaran Workshop disesuaikan dengan penawaran yang ada	Laporan
Materi Workshop PPK BLUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar BLUD &amp; Tata Kelola BLUD.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Bisnis &amp; Anggaran (RBA).</li> <li>3. Alur Penerimaan dan Pengeluaran.</li> <li>4. Penatausahaan Pejabat Keuangan</li> <li>5. Penyusunan Laporan Keuangan.</li> </ol>	Ceramah, Tanya Jawab dan Simulasi menggunakan sistem Syncore BLUD
Jumlah penerima manfaat dari pelaksanaan Workshop PPK BLUD	Peserta menganggap workshop PPK BLUD bermanfaat bagi pelaksanaan PPK BLUD di instansi mereka	Kuesioner

# Indikator Kesuksesan Pendampingan PPK BLUD

PJJO Pola Pengelolaan Keuangan BLUD		
INDIKATOR	TARGET	METODE POTENSIAL
Jumlah Klien aktif yang melakukan pendampingan jarak jauh online	Klien aktif melakukan pendampingan PPK BLUD meliputi RBA, Penatausahaan keuangan hingga Laporan Keuangan	Pendampingan Jarak Jauh Online menggunakan aplikasi digital
Jumlah Klien Aktif yang dapat menyusun laporan anggaran, penatausahaan keuangan BLUD hingga laporan keuangan BLUD menggunakan system aplikasi Syncore BLUD	Klien aktif yang melaporkan laporan anggaran, penatausahaan keuangan BLUD hingga laporan keuangan BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku	Review laporan penatausahaan keuangan triwulan dan review laporan keuangan semesteran dan tahunan
Jumlah penerima manfaat dari pelaksanaan Pendampingan PPK BLUD	Peserta menganggap pendampingan PPK BLUD bermanfaat bagi pelaksanaan PPK BLUD di instansi mereka	Kuesioner

# Layanan Pelatihan dan Pendampingan **Syncore BLUD Lainnya**

Untuk menunjang terlaksananya implementasi PPK BLUD sesuai dengan peraturan berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:

**Pelatihan/Pendampingan  
Penyusunan Peraturan  
Kepala Daerah**

1

**Pelatihan/Pendampingan  
Perhitungan Unit Cost  
sebagai Dasar Penyusunan  
Pola Tarif BLUD**

2

**Pelatihan/Pendampingan  
Remunerasi**

3

**Pelatihan/Pendampingan  
Pembentukan dan  
Penguatan SPI BLUD**

4

**Pelatihan/Pendampingan  
Penyusunan laporan  
keuangan bagi tenaga  
akuntansi**

5

**Pendampingan Persiapan  
Penerapan BLUD**

6

**Penyusunan Dokumen  
Adminitratif Penerapan  
BLUD**

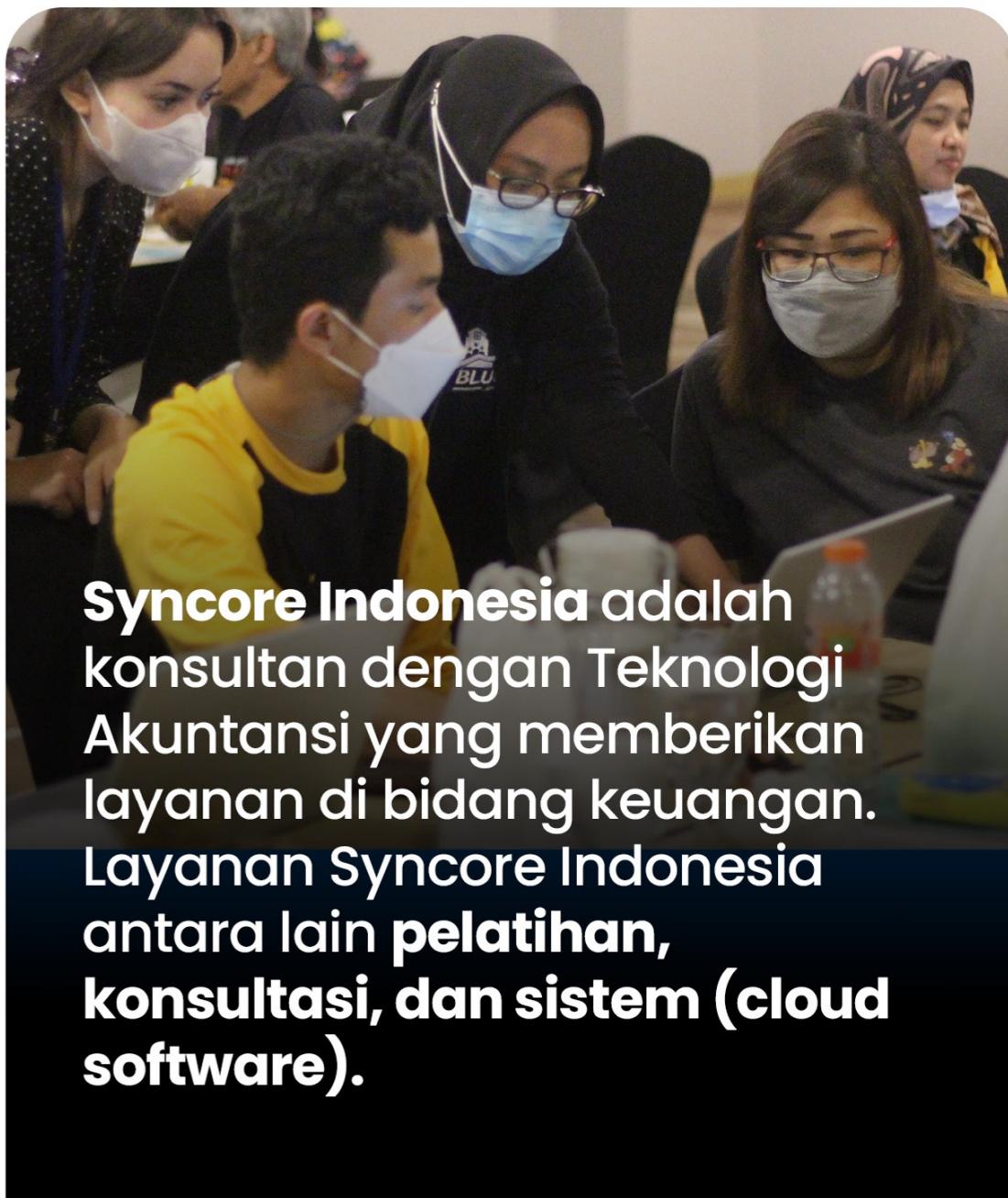
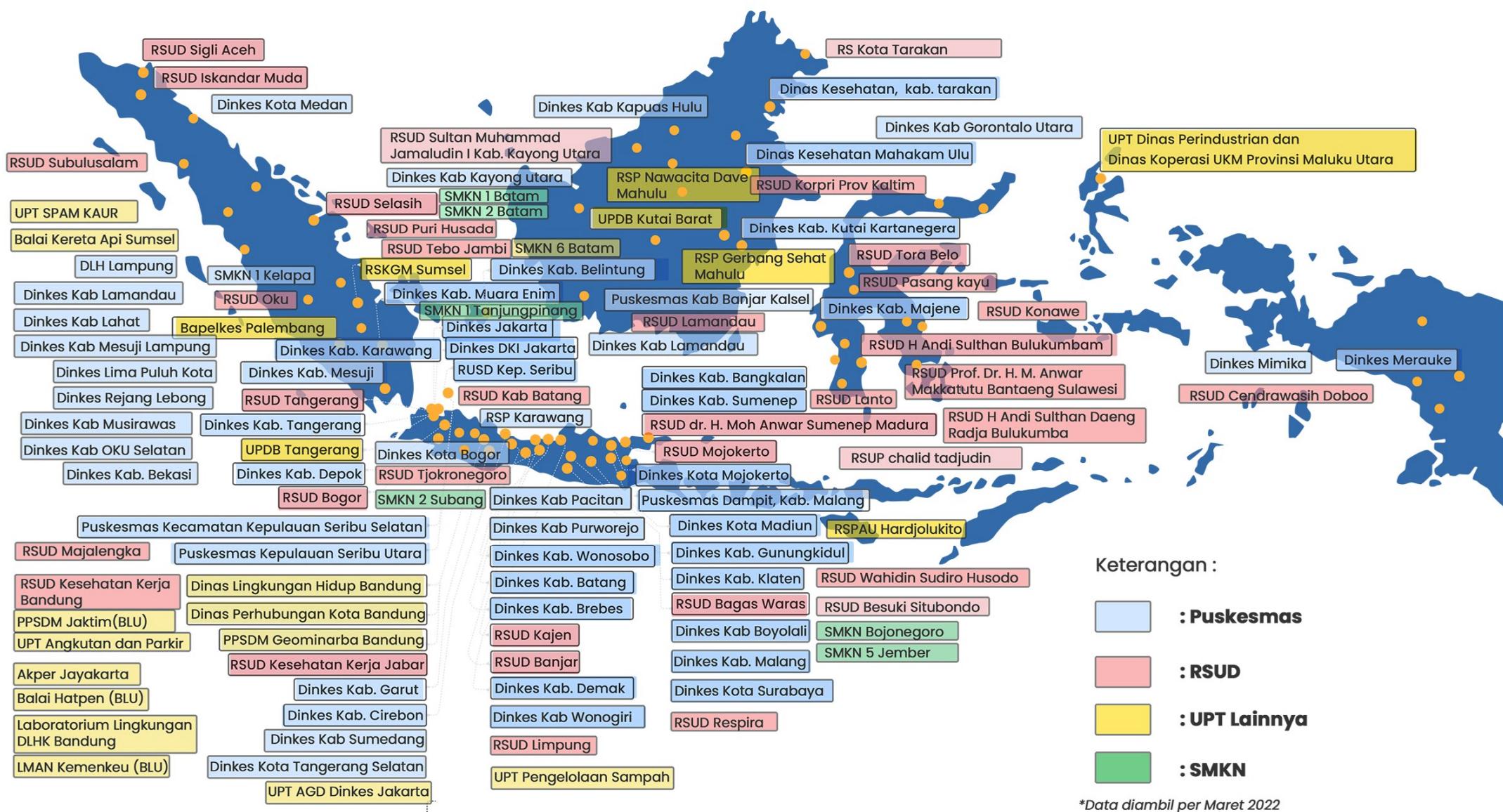
7

**Penyusunan Peraturan  
Kepala Daerah**

8

# Profile BLUD

## Peta Mitra Syncore BLUD



Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli 2010 yang memberikan jasa konsultan manajemen bisnis dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Syncore Indonesia kini memberikan layanan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, kami telah mendampingi lebih dari 1.100 instansi, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

# Narasumber



## Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M, CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi, tenaga ahli serta **narasumber BLUD yang berpengalaman dalam melakukan lebih dari 1000 pelatihan dan pendampingan**. Beliau juga terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

## Partner Narasumber Dan Praktisi



### Dr Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ak., CA

Dosen Akuntansi  
Universitas  
Muhammadiyah  
Yogyakarta, mantan  
auditor senior,  
berpengalaman lebih 300  
(tiga ratus) pelatihan dan  
pendampingan.

### Andri Yandono, SE, MM

Dewan pengawas RSUD  
Kota Yogyakarta dan  
RSUD Panembahan  
Senopati Bantul, Kepala  
Keuangan RSUD  
Panembahan Senopati  
Bantul, tim penilai BLUD  
Kabupaten Bantul.

### Soni Haksomo, SE, M.Si

Kasubag keuangan  
RSUD Kota Yogyakarta

- **Tim perndamping BLUD Syncore**

# Partner

# PARTNER KAMI



Dinkes Kabupaten Lahat  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan  
Kabupaten Musi Rawas Utara



Dinas Kesehatan  
Kab. Limapuluh Kota



Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau



UNIT PELAYANAN  
AMBULANS GAWAT DARURAT  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



DINAS KOPERINDAG  
KABUPATEN KUTAI BARAT



ppsdm  
GEOMINERBA



# Partner



# Partner

# PARTNER KAMI



**RSIA SELASIH MEDIKA**



RSUD PURI HUSADA

KABUPATEN SUMENEP

RSUD Cendrawasih Dobo

RSK GIGI DAN MULUT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RSUD Kepulauan Seribu

RSUD KOTA TANGERANG

RSUD Kajen

BAKTI HUSADA

RUANG SAKIT UMUM DEPOH

KOTA BOGOR

RSUD Kesehatan Kerja

Provinsi Jawa Barat

RUMAH SAKIT UMMI

KOTA TANGERANG SELATAN

BAGAS WARAS

RSUD DE WAHIDIN SUDIROHO

KOTA MOJOKERTO

RSUD BESUKI

RSUD BENYAMIN GULUH

Kab. Kulon Progo

RSBG

Rumah Sakit Benyamin Guluh

Kab. Kulon Progo

RSUD Kabupaten Majalengka

RSUD KORPRI

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RSUD STS TEBO

RSPAU dr. S. HARDJOLUKITO

Melopas Dengan Profesional, Amanah Dan Seimbang Hati

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN ARU

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAYONG UTARA

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN OKU SELATAN

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUARADUA

# Partner

